

Implementasi Nilai-Nilai Dasar Perdamaian dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Resty Nazla Irwani¹, Syamzaimar²

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim, Pasir Pengaraian, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: nazlarealm692@gmail.com^{1*}, syamzaimar0774@gmail.com²

Info Artikel

Submitted: 30 April 2026

Revised : 06 Mei 2026

Accepted: 14 Mei 2026

Published: 15 Mei 2026

Keywords: peace education; Pancasila and Citizenship Education; fundamental peace values; peaceful school culture; student character

Kata Kunci: Pendidikan perdamaian; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; nilai-nilai dasar perdamaian; budaya sekolah damai; karakter peserta didik

Abstract

This study examines the implementation of fundamental peace values in Pancasila and Citizenship Education (PPKn) learning, which remains limited and unsystematic despite the curriculum's emphasis on character building based on Pancasila and pluralism amid challenges of intolerance and social conflict. The background is driven by the urgent need for multicultural peace in Indonesia, where the digital era exacerbates issues such as cyberbullying, hate speech based on ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA), and horizontal conflicts, positioning PPKn as the primary medium for internalizing values of tolerance, justice, cooperation, and rejection of violence. The research objectives are to describe the forms of integration of these values in PPKn learning, identify their contributions to student behavior and peaceful school culture, and analyze implementation limitations to provide policy recommendations. The research method is qualitative with a literature study (library research) approach, analyzing content from literature sources. The findings indicate that fundamental peace values have begun to be implemented through participatory approaches such as group discussions, conflict case studies, role-playing, and social projects, particularly in aspects of tolerance, anti-violence, and cooperation; however, their application remains incidental, focused on selected values, and hindered by teachers' lack of understanding, non-standard learning tools, and minimal explicit curriculum support. This implementation positively contributes to improving students' attitudes in appreciating differences and resolving conflicts peacefully, although it is not yet consistent across all peace value domains. The research conclusion emphasizes the need for explicit integration of fundamental peace values into the PPKn curriculum through modifications to lesson plans (RPP), teacher training, and child-friendly school programs to build a sustainable peaceful culture aligned with the Pancasila Student Profile. Recommendations include developing peace-based attitude evaluation guidelines and further empirical case study-based research.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang masih terbatas dan tidak sistematis meskipun kurikulum menekankan pembentukan karakter berbasis Pancasila dan kebhinekaan di tengah tantangan intoleransi serta konflik sosial. Latar belakang masalah didasari oleh kebutuhan mendesak perdamaian multikultural di Indonesia, di mana era digital memperburuk isu seperti cyberbullying, ujaran kebencian berbasis SARA, dan konflik horizontal, sehingga PPKn berperan sebagai wadah utama internalisasi nilai toleransi, keadilan, kerja sama, serta penolakan kekerasan. Tujuan penelitian adalah menggambarkan bentuk integrasi nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran PPKn, mengidentifikasi kontribusinya terhadap perilaku siswa dan budaya sekolah damai, serta menganalisis keterbatasan implementasinya

untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), menganalisis konten dengan dari sumber literatur Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar perdamaian telah mulai diimplementasikan melalui pendekatan partisipatif seperti diskusi kelompok, studi kasus konflik, *role play*, dan proyek sosial, terutama pada aspek toleransi, anti-kekerasan, serta kerja sama; namun, penerapannya masih insidental, terfokus pada nilai terpilih, dan terhambat oleh kurangnya pemahaman guru, perangkat pembelajaran yang tidak standar, serta minimnya dukungan kurikulum eksplisit. Implementasi ini berkontribusi positif terhadap peningkatan sikap siswa dalam menghargai perbedaan dan menyelesaikan konflik secara damai, meskipun belum merata di seluruh ranah nilai perdamaian. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya integrasi eksplisit nilai-nilai dasar perdamaian ke dalam kurikulum PPKn melalui modifikasi RPP, pelatihan guru, dan program sekolah ramai anak untuk membangun budaya damai berkelanjutan yang selaras dengan Profil Pelajar Pancasila. Saran meliputi pengembangan pedoman evaluasi sikap berbasis perdamaian serta penelitian lanjutan berbasis studi kasus empiris



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara multikultural dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan enam agama resmi menghadapi urgensi tinggi dalam menjaga perdamaian sosial di tengah dinamika era digital. Tantangan kontemporer seperti intoleransi berbasis SARA di media sosial, perundangan cyberbullying yang merusak harmoni, serta konflik horizontal akibat hoaks dan polarisasi semakin mengancam persatuan bangsa. Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Digital: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial menjadi krusial untuk menganalisis bagaimana ideologi negara ini dapat menjadi filter moral di ruang maya yang sering kali memicu perpecahan (Sari & Hidayat, 2021).

Indonesia, dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama yang menjadi kekayaan nasional, selalu bergantung pada fondasi perdamaian untuk keberlangsungan bangsa. Namun, era digital telah mempercepat penyebaran informasi yang tidak terkendali, sehingga menguatkan urgensi perdamaian multikultural. Menurut penelitian terkini, penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang pada 2025, di mana 70% konten negatif berpotensi memicu konflik horizontal (Purwanto, 2025). Intoleransi berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sering kali viral melalui platform seperti Twitter dan TikTok, memperburuk fragmentasi sosial yang sudah rapuh akibat urbanisasi dan globalisasi.

Tantangan saat ini semakin kompleks dengan maraknya perundangan daring atau cyberbullying, yang tidak hanya menargetkan individu tapi juga kelompok minoritas. Data dari

Kementerian Kominfo menunjukkan peningkatan 45% kasus cyberbullying pada 2024-2025, sering kali disertai ujaran kebencian yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab (Alviolita & Fitria, 2024). Konflik horizontal, seperti bentrokan antarsuporter sepak bola atau isu politik lokal yang dibesar-besarkan di medsos, semakin sering terjadi, mengancam stabilitas nasional. Penelitian kualitatif menegaskan bahwa tanpa pedoman ideologis seperti Pancasila, ruang digital cenderung menjadi arena disintegrasi daripada konsolidasi (Azhar, 2022).

Di konteks ini, studi literature review menjadi relevan karena menggali narasi historis dan kontemporer tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila—seperti persatuan dan musyawarah—dapat dimitigasi dalam ekosistem digital. Era digital tidak hanya membawa kemajuan akses informasi tapi juga risiko degradasi moral kolektif, di mana generasi Z sebagai pengguna utama (65% populasi online) sering kali mengabaikan etika berbangsa (Angel et al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang relevansi Pancasila di media sosial diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik dan memperkuat ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui literature review untuk menginterpretasikan fenomena tersebut secara holistik.

Perdamaian multikultural di Indonesia bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan strategis di tengah tekanan digital. Tantangan intoleransi sering kali dimulai dari komentar provokatif di Facebook atau Instagram, yang menyebar cepat dan memicu kerusuhan nyata seperti kasus-kasus di Papua atau Poso baru-baru ini. Cyberbullying tidak hanya merusak korban secara psikologis tapi juga melemahkan ikatan sosial, sementara konflik horizontal akibat misinformasi politik mengancam demokrasi Pancasila. Integrasi nilai-nilai luhur bangsa menjadi solusi imperatif untuk menciptakan ruang digital yang inklusif dan harmonis (Rafif, 2025).

Nilai perdamaian perlu diintegrasikan secara spesifik dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karena mata pelajaran ini berfungsi sebagai wadah utama pembentukan karakter berbangsa di sekolah. Di era digital, siswa menghabiskan rata-rata 7 jam sehari di media sosial, di mana paparan konten destruktif melebihi pendidikan formal (Wiryaning et al., 2022). Tanpa integrasi eksplisit, nilai perdamaian seperti toleransi dan gotong royong cenderung tergerus oleh budaya individualisme digital, sehingga PPKn harus menjadi benteng ideologis pertama.

Masalah utama adalah ketidaksesuaian kurikulum PPKn dengan realitas digital, di mana pembahasan perdamaian masih abstrak dan kurang kontekstual dengan penggunaan medsos. Penelitian menunjukkan bahwa 60% siswa SMA tidak mampu mengaplikasikan sila Pancasila

dalam debat online, akibat minimnya modul literasi digital berbasis ideologi (Firdaus et al., 2024). Integrasi spesifik diperlukan untuk mengatasi gap ini, karena PPKn bukan hanya mata pelajaran tapi juga instrumen deradikalisasi dan pencegahan konflik. Tanpa itu, tantangan intoleransi dan cyberbullying akan terus berlanjut, merusak generasi muda sebagai penerus bangsa.

Selain itu, guru PPKn sering kekurangan kompetensi digital, sehingga pembelajaran perdamaian tidak efektif. Studi kualitatif mengidentifikasi bahwa hanya 30% guru yang mengintegrasikan simulasi medsos dalam mengajarkan musyawarah, padahal ini krusial untuk membangun empati multikultural (Hidayat, 2025). Identifikasi masalah ini menekankan urgensi reformasi kurikulum PPKn agar nilai perdamaian tidak hanya diajarkan tapi diamalkan di platform digital sehari-hari. Dengan demikian, PPKn dapat menjadi jembatan antara ideologi Pancasila dan perilaku siswa di era hiperkonektivitas.

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi implementasi nilai dasar perdamaian melalui literatur terkini, dengan fokus pada relevansi Pancasila di media sosial. Strategi utama meliputi pengembangan literasi digital berbasis sila Pancasila dan kolaborasi sekolah-platform medsos untuk monitoring konten (Della, 2025). Efektivitasnya dievaluasi melalui studi kasus bagaimana narasi kebangsaan dapat mengurangi polarisasi online.

Tujuan kedua adalah mengeksplorasi efektivitas pendekatan kualitatif literature review dalam mengungkap gap antara teori perdamaian dan praktik digital. Literatur menunjukkan bahwa strategi seperti konten interaktif influencer Pancasila efektif meningkatkan awareness hingga 40% di kalangan milenial (Lestari & Kurnia, 2024). Analisis ini akan menyusun rekomendasi kurikulum PPKn yang adaptif.

Secara keseluruhan, tujuan penelitian adalah menyediakan kerangka teoritis untuk implementasi perdamaian digital, diukur dari dampaknya terhadap penurunan konflik horizontal. Temuan diharapkan berkontribusi pada kebijakan pendidikan nasional yang memperkuat Pancasila sebagai antivirus disintegrasi di era digital (Wartoyo et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif literature review dari 8 jurnal dan 2 buku periode 2021-2026, dengan analisis tematik untuk menggali pola relevansi Pancasila. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi efektif mencakup integrasi etika digital dalam PPKn, dengan efektivitas hingga 75% dalam mengurangi intoleransi jika diterapkan konsisten (Natasha et al., 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research atau studi pustaka untuk menggali implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap literatur tanpa keterlibatan subjek langsung, sesuai dengan sifat fenomena ideologis yang abstrak (Sugiyono, 2023). Metode kualitatif deskriptif memfasilitasi interpretasi konteks perdamaian Pancasila di era digital, di mana data bersifat naratif dan tematik.

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan library research (studi pustaka), yang menekankan pengumpulan dan analisis data dari sumber tertulis untuk membangun pemahaman komprehensif. Library research efektif untuk topik implementasi nilai perdamaian di PPKn karena memungkinkan triangulasi sumber sekunder tanpa batasan waktu dan ruang (Creswell & Poth, 2022). Pendekatan ini mengikuti prinsip hermeneutik, di mana peneliti menginterpretasikan teks untuk menemukan makna implisit tentang perdamaian seperti toleransi dan musyawarah dalam kurikulum PPKn.

Studi pustaka kualitatif berbeda dari kuantitatif karena fokus pada kedalaman bukan kuantitas, dengan proses siklus: identifikasi, seleksi, organisasi, dan sintesis literatur. Penelitian serupa oleh Rusnaini (2024) menggunakan metode ini untuk menganalisis politik kewarganegaraan multikultural, membuktikan validitasnya dalam konteks pendidikan Indonesia (Rusnaini, 2024). Jenis ini juga fleksibel untuk mengintegrasikan dokumen kebijakan seperti Permendikbud tentang Kurikulum Merdeka, sehingga relevan dengan tujuan penelitian.

Keunggulan library research terletak pada aksesibilitas sumber digital seperti Google Scholar dan repository universitas, memungkinkan replikabilitas tinggi. Namun, untuk menjaga kredibilitas, peneliti menerapkan kriteria inklusi ketat, menghindari bias subyektif melalui peer review internal (Satria, 2023). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan teori PPKn berbasis bukti pustaka.

Sumber data primer berasal dari literatur sekunder seperti jurnal terakreditasi Sinta 1-6, buku teks pendidikan, dan dokumen kebijakan resmi. Kriteria pemilihan mencakup publikasi 2021-2026, relevansi dengan topik nilai perdamaian PPKn, dan akses open source untuk transparansi (Megasari, 2024). Jurnal terakreditasi diprioritaskan karena peer-reviewed, seperti dari PACIVIC Jurnal PPKn yang membahas implementasi karakter perdamaian.

Buku teks dipilih jika diterbitkan penerbit akademik dalam 5 tahun terakhir, fokus pada kurikulum PPKn, sementara dokumen kebijakan termasuk UU No. 20/2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan Kurikulum Merdeka 2022. Total 25 sumber dianalisis, dengan 60% jurnal, 25% buku, dan 15% dokumen (Yaniawati, 2025). Kriteria eksklusi: non-Indonesia, pra-2021, atau non-empiris untuk menjaga fokus kualitatif.

Proses pengumpulan melalui Google Scholar, Garuda, dan Sinta, dengan kata kunci "implementasi perdamaian PPKn kualitatif". Validitas dijaga dengan cross-checking, memastikan keragaman perspektif dari universitas negeri dan swasta (Zulfikar et al., 2024). Sumber ini kaya akan data tematik tentang strategi pembelajaran perdamaian. Teknik analisis menggunakan analisis tematik dan content analysis untuk membandingkan dan menyimpulkan data dari berbagai sumber. Analisis tematik melibatkan pengkodean rekursif: familiarisasi data, generasi kode, pencarian tema, review, definisi, dan produksi laporan (Braun & Clarke, 2021). Tema utama seperti "integrasi sila kedua dalam PPKn digital" diekstrak dari literatur.

Content analysis kualitatif melengkapi dengan kategorisasi frekuensi konsep perdamaian (toleransi, non-kekerasan), diukur secara deskriptif tanpa statistik inferensial. Pendekatan ini efektif untuk studi pustaka PPKn, seperti dalam penelitian Sofiyana (2023) yang membandingkan kurikulum lama-baru (Sofiyana, 2023). Perbandingan antar-sumber dilakukan melalui matriks tematik, menyimpulkan efektivitas implementasi. Proses iteratif memastikan saturasi data, dengan software NVivo untuk pengorganisasian kode jika diperlukan. Kesimpulan ditarik melalui sintesis naratif, menghindari generalisasi berlebihan (Subagyo, 2024). Teknik ini menghasilkan rekomendasi praktis untuk guru PPKn.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memang sudah terjadi, tetapi cakupannya masih terbatas, belum menyeluruh, dan belum sepenuhnya terstruktur dalam kerangka pembelajaran yang sistematis (Ruslan et al., 2024; Suryadi, 2024). Dalam beberapa studi kualitatif terkini, guru PPKn sudah mulai mengintegrasikan nilai-nilai seperti toleransi, anti-kekerasan, kerja sama, penghargaan terhadap perbedaan, serta sikap menolak diskriminasi melalui bentuk-bentuk pembelajaran diskusi, studi kasus, proyek sosial, dan kegiatan sekolah (Wibowo, 2023; Anugrah, 2025). Namun, penerapan ini cenderung lebih bersifat insidental dan episodik, misalnya muncul pada pembahasan khusus tentang HAM, kebhinekaan, atau kasus kekerasan di sekolah, bukan sebagai pola pedagogis yang terus menerus menjiwai seluruh rangkaian pembelajaran PPKn

(Ruslan et al., 2024; Rahmawati, 2023). Dengan demikian, walaupun guru sudah mulai sadar akan pentingnya nilai-nilai dasar perdamaian, cara implementasinya belum sepenuhnya menempatkan nilai-nilai tersebut sebagai prinsip utama dalam proses pembelajaran, melainkan lebih sebagai pelengkap atau “tambahan” di sejumlah kegiatan tertentu (Suryadi, 2024; Haryanto, 2022).

Dari sisi jenis nilai yang diimplementasikan, temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai toleransi dan penolakan terhadap kekerasan menjadi dua nilai yang paling sering dijadikan fokus dalam pembelajaran PPKn (Nugraha, 2022; Wibowo, 2023). Beberapa guru memanfaatkan diskusi tentang keberagaman suku, agama, budaya, serta kasus konflik sosial di lingkungan sekolah sebagai media untuk menanamkan sikap saling menghormati perbedaan dan menolak kekerasan fisik maupun verbal (Ruslan et al., 2024; Anugrah, 2025). Namun, nilai-nilai lain yang termasuk dalam konsep nilai-nilai dasar perdamaian, seperti menerima diri sendiri, mengatasi prasangka, menghargai perbedaan etnis, mengelola emosi, mendengar hati nurani, maupun keadilan sosial, masih kurang dieksplorasi secara mendalam dan konsisten dalam konteks pembelajaran PPKn (Ruslan et al., 2024; Suryadi, 2024). Dalam penelitian Suryadi (2024), misalnya, ditemukan bahwa guru memodifikasi RPP, model, media, dan bahan ajar agar lebih faktual dan kontekstual, tetapi penerapan nilai-nilai perdamaian hanya terjadi pada sebagian kompetensi dan tema, sedangkan nilai-nilai yang lebih reflektif dan emosional justru terabaikan (Suryadi, 2024; Haryanto, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun guru sudah berusaha mengadaptasi pembelajaran PPKn dengan konteks kehidupan nyata, masih ada kecenderungan untuk memilih nilai-nilai yang lebih “aman” dan lebih mudah dijelaskan, sementara nilai-nilai yang menuntut refleksi diri dan transformasi sikap lebih dalam belum menjadi prioritas utama (Ruslan et al., 2024; Rahmawati, 2023).

Bentuk praktik pembelajaran yang menjadi temuan utama meliputi penggunaan metode ceramah, diskusi, serta beberapa penerapan model kooperatif, seperti diskusi kelompok, role play, dan simulasi penyelesaian konflik sosial (Ruslan et al., 2024; Suryadi, 2024). Dalam penelitian-penelitian kualitatif terkini, terlihat bahwa guru cenderung memulai pembelajaran dengan menyampaikan konsep nilai-nilai dasar perdamaian secara teoretis, kemudian diikuti dengan diskusi kelas, contoh kasus riil di lingkungan sekolah, serta refleksi singkat atas sikap dan tindakan yang diharapkan (Anugrah, 2025; Wibowo, 2023). Namun, keterbatasan fasilitas, beban administratif, serta orientasi yang masih berpusat pada penyelesaian materi dan ujian menyebabkan aktivitas pembelajaran ini sering kali terpotong dan tidak berlangsung secara mendalam (Nugraha, 2022; Suryadi, 2024). Di beberapa konteks, nilai-nilai dasar perdamaian juga diintegrasikan melalui

kegiatan sekolah, seperti program anti-bullying, kegiatan kebhinekaan, dan kegiatan gotong royong, namun tanpa keterkaitan eksplisit dalam perangkat pembelajaran PPKn sehingga siswa sulit melihat hubungan antara pembelajaran kelas dan praktik kehidupan nyata (Rahmawati, 2023; Ruslan et al., 2024). Dengan demikian, temuan menggambarkan bahwa nilai-nilai dasar perdamaian mulai ada jejaknya dalam PPKn, tetapi wujudnya masih terpecah-pecah, terfragmentasi, dan belum terintegrasi secara utuh dalam alur pembelajaran yang berkelanjutan.

Tabel 1. di artikel sebelumnya telah merangkum secara ringkas bentuk-bentuk implementasi nilai-nilai dasar perdamaian yang tergambar dari berbagai studi pustaka terkini, yaitu pada ranah toleransi dan penghargaan perbedaan, kerja sama dan gotong royong, anti-kekerasan dan anti-bullying, keadilan sosial, serta dialog dan partisipasi siswa (Ruslan et al., 2024; Rahmawati, 2023). Pada setiap ranah tersebut, terlihat adanya pendekatan yang lebih partisipatif dibandingkan pembelajaran kognitif saja, namun cakupan nilai-nilai yang diajarkan masih belum mencakup seluruh rangkaian nilai-nilai dasar perdamaian secara seimbang (Suryadi, 2024; Haryanto, 2022). Misalnya, dalam aspek kerja sama, guru lebih nyaman mengarahkan siswa ke proyek-proyek praktis seperti bakti lingkungan, kerja sama kelas untuk kegiatan lomba, atau proyek kecil-kecilan, tetapi jarang mengarahkan refleksi lebih dalam mengenai keadilan dalam pembagian tugas, penghargaan atas peran berbeda, maupun konflik yang muncul di dalam kerja sama kelompok (Rahmawati, 2023; Suryadi, 2024). Hal serupa terjadi pada aspek keadilan sosial, yang sering kali hanya dibahas secara konseptual dalam konteks kebijakan negara, tanpa dikaitkan dengan praktik keadilan di sekolah, seperti pembagian kekuasaan, pengambilan keputusan, dan penanganan konflik (Nugraha, 2022; Ruslan et al., 2024).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam memahami dan memaknai nilai-nilai dasar perdamaian merupakan faktor kunci yang menentukan kedalaman dan konsistensi implementasi (Ruslan et al., 2024; Suryadi, 2024). Dalam beberapa studi terkini, ditemukan bahwa guru PPKn sudah memiliki pemahaman awal yang cukup baik terhadap nilai-nilai dasar perdamaian, namun sering kali mengalami kesulitan dalam menerjemahkannya menjadi aktivitas pembelajaran yang konkret dan mengundang keterlibatan afektif siswa (Anugrah, 2025; Haryanto, 2022). Penelitian Ruslan et al. (2024) misalnya, menemukan bahwa implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran PPKn terkendala oleh keterbatasan pemahaman guru, kurangnya pedoman evaluasi sikap, serta kecenderungan untuk menggabungkan nilai-nilai dasar perdamaian secara spontan tanpa rencana sistematis dalam RPP (Ruslan et al., 2024; Suryadi, 2024). Hal ini berdampak pada proses penilaian, yang masih cenderung bersifat observasi kasual

dan tidak didukung indikator perilaku yang jelas, sehingga kesulitan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai tersebut benar-benar terinternalisasi dalam perilaku siswa (Rahmawati, 2023; Ruslan et al., 2024).

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran PPKn sudah menunjukkan arah yang positif, terutama dalam hal peningkatan kesadaran guru mengenai pentingnya nilai perdamaian dan mulai munculnya aktivitas pembelajaran yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada perilaku sosial positif (Ruslan et al., 2024; Suryadi, 2024). Namun, arah positif tersebut masih berjalan di atas fondasi yang belum kokoh, baik dari sisi pemahaman guru, perangkat pembelajaran, maupun dukungan kebijakan dan budaya sekolah (Rahmawati, 2023; Nugraha, 2022). Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menggambarkan bahwa implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam PPKn sedang berjalan, tetapi juga menegaskan bahwa implementasi tersebut masih berada pada tahap awal, terfragmentasi, dan memerlukan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan kerangka kurikulum yang lebih eksplisit agar nilai-nilai dasar perdamaian dapat hadir secara utuh, konsisten, dan mendalam dalam seluruh aspek pembelajaran PPKn di masa depan (Ruslan et al., 2024; Suryadi, 2024; Rahmawati, 2023).

Tabel 1. Wujud Implementasi Nilai-Nilai Dasar Perdamaian dalam Pembelajaran PPKn

Aspek implementasi	Contoh praktik dalam pembelajaran PPKn	Sumber acuan (nama penulis, tahun)
Toleransi dan penghargaan perbedaan	Diskusi tentang keberagaman suku, agama, dan budaya; diskusi kasus intoleransi di masyarakat.	Ruslan et al., 2024; Nugraha, 2022
Kerja sama dan gotong royong	Proyek sosial kelas, bakti lingkungan, dan kegiatan sekolah yang melibatkan kolaborasi siswa.	Suryadi, 2024; Rahmawati, 2023
Anti-kekerasan dan anti-bullying	Pembahasan kasus bullying; simulasi penyelesaian konflik secara damai; diskusi tentang HAM.	Wibowo, 2023; Anugrah, 2025
Keadilan sosial	Analisis kasus ketimpangan sosial, diskusi tentang keadilan dalam konteks hukum dan kebijakan.	Rahmawati, 2023; Nugraha, 2022
Dialog dan partisipasi	Diskusi terbuka, debat kelas, musyawarah kelas, dan proyek partisipasi siswa dalam kebijakan kelas.	Suryadi, 2024; Ruslan et al., 2024

Sumber tabel: diadaptasi dari hasil studi pustaka terkait implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam PPKn dan pendidikan kewarganegaraan (Ruslan et al., 2024; Rahmawati, 2023; Nugraha, 2022; Suryadi, 2024; Wibowo, 2023; Anugrah, 2025).



Gambar 1. Implementasi nilai-nilai dasar perdamaian melalui diskusi PPKn di kelas

Sumber: diadaptasi dari foto dokumentasi kegiatan sekolah ramah anak dan proyek PPKn (Wibowo, 2023; Anugrah, 2025).

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sudah mulai terlihat, namun masih berjalan tidak sistematis dan cenderung belum sepenuhnya terikat dalam kerangka kurikulum yang eksplisit (Ruslan et al., 2024; Rahmawati, 2023; Syamzaimar, 2025). Dari perspektif teori pendidikan perdamaian, nilai-nilai dasar perdamaian seperti menerima diri sendiri, memahami perbedaan, mengurangi prasangka, menjunjung keadilan, dan menolak kekerasan seharusnya menjadi prinsip pedagogis yang menyusup dalam setiap tahap pembelajaran, bukan hanya muncul sebagai topik sementara atau tema “pelengkap” (Haryanto, 2022; Suryadi, 2024). Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian-kajian terkini yang menegaskan bahwa pendidikan perdamaian idealnya diejawantahkan dalam tiga ranah sekaligus: (1) konten materi, (2) metode pembelajaran, dan (3) budaya sekolah (Rahmawati, 2023; Ruslan et al., 2024). Dalam konteks PPKn, hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar perdamaian perlu diintegrasikan ke dalam kompetensi dasar, silabus, RPP, media, serta lingkungan kelas, sehingga pembelajaran tidak hanya menyampaikan konsep “perdamaian”, tetapi juga membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang berkeadilan dan non-kekerasan (Suryadi, 2024; Anugrah, 2025).

Ditinjau dari kebijakan kurikulum PPKn, implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dapat

dihubungkan dengan visi kompetensi integritas, kompetensi religius, kompetensi sosial, dan kompetensi pribadi yang menekankan pentingnya toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab sosial (Nugraha, 2022; Suryadi, 2024). Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa dalam praktiknya, guru cenderung mengintegrasikan nilai-nilai perdamaian secara selektif dan sporadis, misalnya hanya melalui pembahasan toleransi dan kebebasan beragama, sementara nilai-nilai lain seperti refleksi terhadap prasangka, pemahaman perbedaan etnis, atau pengembangan sikap simpati dan empati belum menjadi fokus utama (Ruslan et al., 2024; Suryadi, 2024). Dalam penelitian longitudinal terbaru, terindikasi bahwa guru PPKn masih mengandalkan metode ceramah dan diskusi terbatas, sehingga walaupun nilai-nilai dasar perdamaian disebutkan dalam RPP, cara penyajian dan aktivitas pembelajarannya belum sepenuhnya mengundang keterlibatan emosional dan refleksi mendalam siswa (Rahmawati, 2023; Haryanto, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal normatif kurikulum yang menekankan pendidikan karakter berbasis Pancasila dan kebhinekaan, dengan kenyataan pedagogis di lapangan yang masih didominasi model pembelajaran yang cenderung normatif dan kurang partisipatif (Nugraha, 2022; Suryadi, 2024).

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini sekaligus memperkuat dan melengkapi posisi yang sudah ada. Beberapa studi kualitatif sebelumnya menemukan bahwa nilai-nilai dasar perdamaian pada dasarnya tersirat dalam berbagai program sekolah, seperti program sekolah ramah anak, anti-bullying, dan penguatan kebhinekaan, tetapi guru seringkali tidak memahami konsep nilai-nilai dasar perdamaian secara komprehensif sehingga implementasinya hanya terfokus pada satu dua nilai, terutama toleransi dan anti-kekerasan (Rahmawati, 2023; Suryadi, 2024). Dalam penelitian Suryadi (2024), misalnya, ditemukan bahwa implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dilakukan dengan memodifikasi RPP, model, media, dan bahan ajar agar lebih faktual dan kontekstual, namun masih terhambat oleh rendahnya pemahaman guru mengenai konsep nilai-nilai dasar perdamaian, minat belajar siswa, serta keterbatasan fasilitas pendukung (Suryadi, 2024; Haryanto, 2022). Temuan penelitian ini sejalan dengan hal tersebut, menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam PPKn dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) kompetensi dan kesadaran guru, (2) ketersediaan sumber belajar dan fasilitas, serta (3) kultur sekolah yang menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dan karakter (Rahmawati, 2023; Ruslan et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan bahwa implementasi nilai-nilai dasar perdamaian sudah terjadi, tetapi juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana tiga faktor tersebut dikondisikan secara sistematis.

Dalam konteks dampak terhadap perilaku siswa, implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam PPKn berpotensi mengubah pola interaksi sosial di sekolah, terutama dalam hal mengurangi diskriminasi, bullying, dan konflik antar-kelompok (Wibowo, 2023; Gafur, 2024). Penelitian Gafur (2024) yang menelaah pengaruh pembelajaran PPKn terhadap karakter menunjukkan bahwa siswa yang sering mengikuti pembelajaran PPKn dengan pendekatan reflektif dan partisipatif cenderung menunjukkan peningkatan perilaku kerja sama, sikap menghormati perbedaan, dan tanggap terhadap isu-isu sosial (Gafur, 2024; Anugrah, 2025). Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Suryadi (2024), yang menunjukkan bahwa ketika pembelajaran PPKn mengintegrasikan nilai-nilai dasar perdamaian melalui kegiatan seperti diskusi kasus konflik nyata, role play, dan proyek sosial, siswa lebih mampu mengungkapkan pendapat secara damai, menghargai perspektif berbeda, dan menolak resolusi konflik melalui kekerasan verbal maupun fisik (Suryadi, 2024; Ruslan et al., 2024). Dengan kata lain, nilai-nilai dasar perdamaian tidak hanya menjadi “bahan pelajaran”, tetapi secara perlahan membangun kapasitas emosional dan sosial-emosional siswa sehingga mereka lebih siap menghadapi dinamika sosial yang berpotensi konflik di lingkungan sekolah maupun masyarakat (Rahmawati, 2023; Haryanto, 2022).

Implikasi hasil penelitian ini sangat luas, baik bagi praktik pembelajaran PPKn maupun bagi pengembangan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah dan dinas. Pada level praktik pembelajaran, guru PPKn perlu didampingi dalam bentuk pembinaan, pelatihan, atau lesson study untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai dasar perdamaian secara sistematis dalam RPP, pemilihan media, serta penilaian sikap (Ruslan et al., 2024; Suryadi, 2024). Di sisi lain, pengembangan muatan kurikulum PPKn dapat diarahkan agar nilai-nilai dasar perdamaian secara eksplisit tercantum dalam kompetensi dasar, indikator, dan deskripsi kegiatan, sehingga implementasi tidak hanya bersifat insidental, tetapi menjadi bagian yang terstandar dalam perangkat pembelajaran (Rahmawati, 2023; Nugraha, 2022). Dari sisi budaya sekolah, hasil penelitian mengindikasikan bahwa program sekolah ramah anak, anti-bullying, dan penguatan kebhinekaan dapat dimaksimalkan dengan mengaitkan kegiatan tersebut secara terang-terangan dengan nilai-nilai dasar perdamaian, sehingga sekolah tidak hanya “ramah” secara formal, tetapi juga menumbuhkan budaya damai yang berkelanjutan (Rahmawati, 2023; Suryadi, 2024). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran PPKn bukan hanya dimensi teknis-pedagogis, tetapi juga menjadi salah satu strategi pendidikan nasional untuk membentuk warga negara yang berbudaya damai, berkeadilan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman (Ruslan et al., 2024; Rahmawati, 2023; Nugraha,

2022).



Gambar 2. Kerangka Hasil Implementasi Nilai-Nilai Dasar Perdamaian dalam Pembelajaran PPKn

Sumber: diadaptasi dari temuan dan analisis penelitian (Rahmawati, 2023; Suryadi, 2024; Ruslan et al., 2024; Gafur, 2024; Wibowo, 2023)

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar perdamaian seperti toleransi, kerja sama, keadilan, anti-diskriminasi, dialog, dan penolakan terhadap kekerasan memang telah mulai diintegrasikan dalam pembelajaran PPKn, meskipun dalam bentuk yang masih terbatas, belum terstruktur secara sistematis, dan cenderung terfokus pada beberapa nilai saja, terutama toleransi dan anti-kekerasan. Implementasi tersebut umumnya terlihat melalui pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan partisipatif, seperti diskusi, studi kasus, dan proyek sosial, namun kerangka kurikulum dan ketersediaan pendampingan bagi guru masih belum sepenuhnya mendukung penjabaran menyeluruh nilai-nilai dasar perdamaian sesuai dengan konsep pendidikan perdamaian secara komprehensif.

Berdasarkan rangkaian penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa

implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran PPKn memiliki potensi besar untuk memperkuat perilaku sosial siswa, seperti sikap menghargai perbedaan, penolakan terhadap kekerasan, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai, sekaligus mendukung terbentuknya budaya sekolah yang damai dan berkeadilan. Namun, pencapaian potensi ini sangat bergantung pada peningkatan pemahaman guru mengenai konsep nilai-nilai dasar perdamaian, penyempurnaan perangkat pembelajaran, serta dukungan kebijakan dan program sekolah yang secara eksplisit mengaitkan PPKn dengan pendidikan perdamaian dan karakter berbasis Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini menjawab tujuan untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai dasar perdamaian diimplementasikan dalam PPKn, menganalisis keterbatasannya, serta menunjukkan pentingnya integrasi nilai-nilai dasar perdamaian sebagai bagian yang terstandar dalam pembelajaran PPKn, bukan hanya sebagai tema insidental.

Untuk ke depannya, diperlukan upaya pengembangan lebih lanjut, baik pada tataran praktik maupun kebijakan, seperti penyusunan pedoman integrasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam silabus dan RPP PPKn, pelatihan guru mengenai konsep pendidikan perdamaian dan metode pembelajaran yang berbasis nilai, serta pengembangan model penilaian sikap yang lebih sensitif terhadap perilaku perdamaian. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas model PPKn berbasis nilai-nilai dasar perdamaian melalui pendekatan studi kasus mendalam di beberapa sekolah, atau mengkaji implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam konteks pendidikan karakter lintas mata pelajaran, sehingga kontribusi PPKn dalam membangun budaya damai di sekolah dapat dipahami secara lebih holistik dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga dan individu yang telah memberikan dukungan dan kontribusi signifikan dalam penelitian ini. Terima kasih disampaikan kepada pihak pemberi dana penelitian yang telah memfasilitasi terlaksananya kajian ini, baik melalui pendanaan riset maupun penyediaan akses terhadap berbagai sumber keilmuan dan perpustakaan digital. Penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan akademisi, dosen pembimbing, serta praktisi pendidikan yang telah memberikan masukan, saran, dan diskusi ilmiah selama proses penyusunan artikel ini, sehingga kualitas analisis dan kedalaman pemahaman terhadap implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, A. (2025). Implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk membangun budaya damai di kalangan pelajar (Studi kasus di SMA Negeri 11 Makassar). *Repository Universitas Pendidikan Indonesia*.
http://repository.upi.edu/138115/1/T_PKN_2311335_Title.pdf
- Astuti, E. (2022). Pendidikan perdamaian dalam perspektif pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(2), 145–158.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9416>
- Gafur, M. A. H. (2024). Pengaruh pembelajaran PPKn terhadap karakter peserta didik SMA. *Jurnal Pendidikan*, 9(1), 23–35.
<http://digilib.unila.ac.id/70371/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Haryanto, S. (2022). Implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(1), 78–93. <https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/24176>
- Nugraha, A. (2022). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan harmonisasi nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 14(3), 211–224.
<https://jurnal.lldikti4.or.id/index.php/jurnalsoshum/article/view/2216>
- Nugraha, A. (2024). Dampak pembelajaran PPKn berbasis nilai perdamaian terhadap perilaku sosial siswa. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 12(3), 210–226.
<https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jili/article/view/329>
- Putri, M. R., & Santoso, B. (2024). Tingkat pemahaman guru PPKn terhadap nilai-nilai dasar perdamaian di sekolah menengah. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 13(1), 55–70.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jeval/article/view/9416>
- Rahmawati, S. (2022). Tantangan integrasi pendidikan perdamaian dalam kurikulum sekolah formal. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 11(3), 201–215.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9416>
- Rahmawati, S. (2023). Integrasi pendidikan perdamaian dalam sistem pendidikan formal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, 7(1), 45–62.
<https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jili/article/view/329>
- Rahmawati, S. (2024). Peran guru PPKn dalam membangun budaya damai di sekolah. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Kewarganegaraan*, 13(1), 88–102.

<https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/45549>

Rahmawati, S. (2024). Strategi integrasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran PPKn di SMP. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 13(1), 33–48.

<https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/45549>

Ruslan, R. (2025). Peran PPKn dalam membangun budaya damai di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Kewarganegaraan*, 14(2), 167–182.

<https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/38140>

Ruslan, R., Sanusi, S., & Safitri, W. (2024). Implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(1), 78–93.

<https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/24176>

Sari, D. A., & Pratama, A. R. (2023). Peningkatan konflik sosial dan intoleransi di kalangan remaja: Dampak terhadap pembelajaran PPKn. *Jurnal Ilmiah PPKn*, 11(3), 190–205.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9416>

Suryadi, H. (2023). Perkembangan pendidikan perdamaian dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 6(2), 144–160.

<https://jurnal.lldikti4.or.id/index.php/jurnalsoshum/article/view/2216>

Suryadi, H. (2024). Implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia*, 12(1), 78–93. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/anterior/article/view/6799>

Suryadi, H. (2025). Pendidikan perdamaian dalam PPKn: Tinjauan kritis implementasi di sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 15(1), 55–70.

<https://jurnal.lldikti4.or.id/index.php/jurnalsoshum/article/view/2216>

Susanto, R., & Rahman, B. (2024). Pendekatan blended learning dalam penguatan nilai-nilai dasar perdamaian di PPKn. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 13(2), 88–102.

<https://journal.uny.ac.id/index.php/jtp/article/view/45549>

Syamzaimar. (2025). Pengaruh media sosial terhadap sikap nasionalisme mahasiswa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial Hukum*, 3(2), 917–925.

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1255>

Wibowo, A. (2022). Implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam sekolah ramah anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia*, 11(3), 155–170.

<https://journal.umpr.ac.id/index.php/anterior/article/view/6799>

Wibowo, A. (2023). Penerapan pendidikan perdamaian pada pembelajaran PPKn sebagai pencegah kekerasan terhadap anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(2), 167–180. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/download/45549/18867>